

Komersialisasi Pertanian Kota Dalam Tekanan Pasar Perspektif Ekologi Politik

Kinanti Indah Safitri^{*1}, Oekan S Abdoellah², Budhi Gunawan³

¹Department of Government Studies, Faculty of Psychology, Social and Political Sciences, Universitas Abdurrab, Pekanbaru, 28291, Indonesia;

²Department of Anthropology, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Padjadjaran, Sumedang, 45363, Indonesia;

³Center for Environment and Sustainability Science, Universitas Padjadjaran, Bandung, 40134, Indonesia;

e-mail: [*kinanti.indahsafitri@univrab.ac.id](mailto:kinanti.indahsafitri@univrab.ac.id) , oekan.abdoellah54@gmail.com , budhi.gunawan@unpad.ac.id

Diterima: 31 Juli 2024

Direview: 1 Agustus 2024

Diterbitkan: 1 Agustus 2024

Hak Cipta © 2023 oleh Penulis (dkk) dan Jurnal SUMUR

*This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Abstract – The existence of commercial urban agriculture practices shows the phenomenon of commercialization, which involves producer actors as producers of commodified output on a global and local scale. In previous studies, urban agriculture was often identified as an alternative movement to strengthen food security carried out by producer actors in household units. However, in its current development, urban agricultural producer actors come from various social and economic backgrounds, especially those who carry out commercial-scale urban agricultural practices. This study aimed to measure the commercialization index of farmer households while describing the phenomenon of urban agricultural commercialization controlled by economic-political forces on a global and local scale based on a political ecology perspective. The research method used in the study was a mixed method with an explanatory design. The process of collecting quantitative data used an urban agricultural commercialization index questionnaire, while qualitative data collection was done through in-depth interviews and documentation. The results of this study showed that the commercialization index of urban farmer households was 94.71%. It meant that most of the farmers' harvests were oriented to be sold to market actors. The commercialization process made a significant contribution to the implementation of technical regulatory instruments and food standards that had the essence of ensuring food security and environmental stability. However, farmers were increasingly entangled in partnership mechanisms with agricultural companies. The social consequences were that farmers lost their authority in managing production methods, determining the type of input, and losing their power in determining selling prices.

Keywords – Urban Agriculture, Commercialization, Ekologi Politik

Abstrak – Adanya praktik pertanian perkotaan yang bersifat komersial menunjukkan adanya fenomena komersialisasi yang melibatkan pelaku produsen sebagai penghasil output yang dikomodifikasi dalam skala global dan lokal. Dalam penelitian sebelumnya, pertanian perkotaan sering diidentifikasi sebagai gerakan alternatif untuk memperkuat ketahanan pangan yang dilakukan oleh pelaku produsen dalam unit rumah tangga. Namun dalam perkembangannya saat ini, pelaku produsen pertanian perkotaan berasal dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, terutama mereka yang melakukan praktik pertanian perkotaan berskala komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur indeks komersialisasi rumah tangga petani sekaligus mendeskripsikan fenomena komersialisasi pertanian

perkotaan yang dikendalikan oleh kekuatan ekonomi-politik dalam skala global dan lokal berdasarkan perspektif ekologi politik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran dengan desain eksplanatori. Proses pengumpulan data kuantitatif menggunakan kuesioner indeks komersialisasi pertanian perkotaan, sedangkan pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa indeks komersialisasi rumah tangga petani perkotaan sebesar 94,71%. Artinya sebagian besar hasil panen petani berorientasi untuk dijual kepada pelaku pasar. Proses komersialisasi memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerapan instrumen regulasi teknis dan standar pangan yang memiliki esensi untuk menjamin keamanan pangan dan stabilitas lingkungan. Namun, petani semakin terjerat dalam mekanisme kemitraan dengan perusahaan pertanian. Konsekuensi sosialnya adalah petani kehilangan otoritas dalam mengelola metode produksi, menentukan jenis input, dan kehilangan kekuatan dalam menentukan harga jual.

Kata Kunci – Pertanian Perkotaan, Komersialisasi, Ekologi Politik

I. PENDAHULUAN

Dalam perkembangannya, pertanian kota telah ditransformasikan menjadi praktik produksi pertanian skala intensif yang memiliki nilai komersial tinggi. Fenomena ini dapat ditinjau dari kehadiran praktik pertanian kota komersial di kota besar yang ada di berbagai negara yang telah menjadi tempat aktivitas produksi tanaman intensif bernilai tinggi [1], [2]. Bahkan, hasil produksi pertanian kota juga telah menjadi komoditas pangan skala ekspor [3], [4], [5]. Hal ini dikarenakan optimalisasi produksi pertanian dapat menghasilkan penjualan pasar yang memiliki *rate of return* yang tinggi [6].

Namun demikian, dalam studi komersialisasi di banyak negara terekam bahwa aktivitas pertanian berorientasi komersial tidak lepas dari unsur operasional kekuatan ekonomi politik yang bersinggungan dengan aspek lingkungan [7], [8]. Prabhu L. Pingali [8] menyebutkan bahwa komersialisasi pertanian terhadap lingkungan memiliki dampak yang bervariasi. Integrasi pertanian dalam sistem ekonomi global dapat membawa manfaat lingkungan yang signifikan [8], [9]. Fenomena tersebut dapat ditelusuri dari adanya kebijakan yang memuat pelestarian ekosistem pertanian yang diwajibkan bagi para produsen untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas [10]. Dalam struktur pasar komoditas pertanian, tidak terlepas dari campur tangan rezim pangan yang menyusun mode produksi dan distribusi komoditas pertanian secara global [11]. Akibatnya, petani yang telah masuk dalam arus perdagangan global harus tunduk terhadap kebijakan yang diatur oleh rezim pangan, salah satunya berkaitan dengan memastikan standar keamanan dan keberlanjutan lingkungan pertanian [12].

Komersialisasi pertanian dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan melayani permintaan produk pertanian hingga luar negeri memiliki konsekuensi bagi petani kota. Dominasi peran pasar mengharuskan petani untuk beradaptasi dengan standar kualitas pangan dan peraturan teknis terkait budidaya yang berpotensi melemahkan kedaulatan petani terhadap ruang produksi [13]. Petani kota rentan menghadapi marginalisasi dari struktur hierarkis perdagangan global yang memuat regulasi dan standar pangan yang harus ditaati petani. Mekanisme ini dapat memproduksi relasi antar aktor pertanian yang tidak setara serta mengalienasi petani dari penguasaan sumber daya pertanian [14], [15]. Dengan demikian, pelaksanaan pertanian perkotaan memiliki berbagai kendala terkait faktor ekonomi, politik, dan sosial yang meliputi berbagai aspek pengelolaan pertanian perkotaan.

Isu yang melingkupi komersialisasi pertanian perkotaan menarik untuk diteliti, khususnya apabila dianalisis dari perspektif ekologi politik. Hal ini dikarenakan komersialisasi pertanian yang dilakukan oleh petani tidak lepas dari kepentingan politik ekonomi dari level global hingga lokal.

Perspektif ekologi politik untuk mengidentifikasi kekuatan politik dan ekonomi yang mempengaruhi kompleksitas masalah yang melingkupi pertanian kota. Ekologi politik merupakan pendekatan yang tepat untuk menganalisis permasalahan sosial-ekonomi seperti halnya kemiskinan, keterbelakangan, ketunakismaan serta marginalisasi politik dan ekonomi [16]. Sejauh ini, penelitian tentang komersialisasi pertanian telah dilakukan di berbagai negara [9], [17], [18], [19], [20]. Namun, studi komersialisasi yang dilakukan lebih berfokus pada komersialisasi pertanian dalam konteks wilayah pedesaan dan kontribusinya terhadap berbagai sektor pembangunan. Belum banyak penelitian yang mengidentifikasi pertanian komersial yang padat modal di perkotaan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengelaborasi fenomena komersialisasi pertanian kota dengan mengambil studi kasus di Bandung Raya, Provinsi Jawa Barat.

II. METODE PENELITIAN

II.1 Desain Riset

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (*mixed method*). Metode campuran yang digunakan adalah desain eksplanatori. Prosesnya meliputi mengumpulkan data kuantitatif, menganalisis data, dan kemudian menggunakan hasil pengumpulan data kuantitatif untuk mendasari tahapan pengumpulan data kualitatif. Pengukuran indeks komersialisasi petani perkotaan di wilayah Bandung Raya untuk mengetahui seberapa intensif produksi pertanian perkotaan di wilayah Bandung Raya yang ditujukan untuk penjualan. Hal ini juga akan membuktikan bahwa subjek yang penulis telusuri lebih jauh adalah benar-benar para petani perkotaan yang telah mengkomersialkan sebagian besar produk mereka.

Sementara itu, pengumpulan data kualitatif untuk mengetahui praktik komersialisasi yang dilakukan oleh petani perkotaan komersial yang indeks komersialisasinya sudah diukur. Upaya pengumpulan data kualitatif ini penting dilakukan untuk memberikan penjelasan yang lengkap dan komprehensif mengenai praktik komersialisasi pertanian kota di Bandung Raya yang dikendalikan oleh struktur kekuatan pasar.

Lokasi penelitian meliputi wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung. Kedua kabupaten tersebut merupakan wilayah Bandung Raya yang termasuk dalam kawasan peri urban. Namun demikian, tidak semua kawasan peri urban di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik agraris. Oleh karena itu, penulis menetapkan kriteria pemilihan kawasan peri urban yang berbatasan langsung dengan zona inti kota sebagai dasar pengembangan kawasan pertanian perkotaan komersial. Alasan pemilihan kawasan peri urban yang berbatasan langsung dengan inti kota karena kawasan tersebut cenderung memiliki karakteristik transisi pedesaan ke perkotaan dimana masih terdapat lahan pertanian namun keberadaannya beriringan dengan perkembangan kawasan perkotaan baru.

Adapun kecamatan yang berbatasan langsung dengan zona intra urban dan menjadi basis wilayah pengembangan pertanian secara intensif adalah: Kecamatan Cimendan (Kabupaten Bandung) dan Kecamatan Lembang (Kabupaten Bandung Barat). Dua kawasan tersebut juga memiliki topografi wilayah dataran tinggi yang menjadi daerah pengembangan pertanian hortikultur. Kecamatan Cimendan (Kabupaten Bandung) merupakan wilayah yang sebelumnya memiliki banyak pertanian lahan kering namun kini mengalami perubahan penggunaan lahan menjadi kawasan terbangun [21]. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah Kecamatan Cimendan termasuk dalam wilayah peri urban yang semula menjadi salah satu daerah dengan potensi utama yaitu hasil pertanian dimana masyarakat memiliki mata pencaharian utama sebagai petani dan peternak [22]. Namun seiring berjalannya waktu, wilayah ini mengalami gejala proses peri-urbanisasi ditinjau dari masifnya perubahan alih fungsi lahan. Sementara itu, Kecamatan Lembang (Kabupaten Bandung Barat) adalah wilayah yang juga memiliki potensi sektor pertanian yang tinggi khususnya untuk komoditas sayuran [23]. Bahkan, hasil pertanian di Lembang tidak hanya untuk memenuhi pasar lokal tetapi telah berhasil di ekspor di berbagai wilayah seperti Singapura, Brunei dan lain-lain [24]. Dengan demikian, penelitian ini mengambil objek lokasi di dua kecamatan tersebut karena merupakan daerah pengembangan pertanian

kota skala komersial dan berbatasan langsung dengan wilayah intra kota.

II.2 Teknik Pengumpulan Data Kuantitatif dan Kualitatif

Metode pengumpulan data kuantitatif dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Awalnya, penulis menggunakan kuesioner tertutup untuk mensurvei petani perkotaan skala komersial mengenai indeks komersialisasi pertanian dalam level rumah tangga yang mereka lakukan serta perubahan unit input yang dibeli serta digunakan pada tahun 2021 hingga tahun 2022. Data terkait unit output dan input akan menjadi bagian penunjang yang menunjukkan adanya fenomena komersialisasi. Karakteristik petani yang menjadi subjek penelitian ini adalah petani kota yang berada di zona peri-urban Bandung Raya dengan ketentuan telah mengkomersialisasikan produknya baik di tingkat lanskap pasar lokal hingga global. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah *multistage cluster sampling*. Dalam prosedur *multistage cluster sampling*, pengambilan sampel bertingkat memerlukan dua atau lebih pengambilan sampel secara acak berdasarkan struktur hierarki kelompok dalam populasi [25]. Metode pengambilan sampel melalui *multistage cluster sampling* digunakan saat tidak tersedianya kerangka sampel dalam unit-unit sampel terkecil [26]. Penggunaan *multistage cluster sampling* dalam penelitian ini dikarenakan penulis tidak memiliki kerangka sampel dari semua anggota dan mitra petani. Hal ini dikarenakan kelompok tani tidak bersedia memberikan data identitas anggota kelompok karena privasi internal lembaga kelompok tani. Perihal kendala kerangka sampel ini, maka penulis menentukan target populasi. Untuk menentukan hal tersebut disesuaikan dengan karakteristik target populasi. Dalam menentukan ukuran sampel (n), peneliti menggunakan *software G* Power 3.1.9.7* dengan uji statistik analisis *power* uji dua arah (*matched pairs*) dengan ketentuan sebagai berikut pada Tabel 1.

Tabel 1. Ketentuan Parameter untuk Menentukan Ukuran Sampel dalam Software G*Power

G*Power Software			
Parameter Input		Parameter Output	
<i>Tail(s)</i>	2	<i>Non centrality parameter</i>	2,82
<i>Effect size dz</i>	0,25	<i>Critical t</i>	1,97
<i>α error probability</i>	0,05	<i>Df</i>	127
<i>Power (1-β probability)</i>	0,8	<i>Total Sample Size</i>	128
		<i>Actual Power</i>	0,8

Sumber: *Software G*Power 3.1.9.7*

Berdasarkan Tabel 1. G*Power dengan ketentuan parameter diatas dapat ditinjau bahwa ukuran sampel minimum dalam penelitian ini sebanyak 128 responden. Oleh karena itu, penulis menetapkan ukuran sampel dalam penelitian ini sebanyak 150 responden petani kota skala komersial untuk menghindari kesalahan data error atau hambatan ketidak-sediaan responden.

Sedangkan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data kualitatif dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait praktik komersialisasi serta pengaruh struktur ekonomi-politik dalam perdagangan produk pangan dari petani kota. Informan dalam penelitian ini adalah para aktor yang memiliki peran dan posisi dalam kegiatan pertanian perkotaan komersial di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat. Penentuan jumlah informan didasarkan pada *point of redundancy* dimana jumlah informan dikatakan cukup apabila penambahan informan sudah tidak mempengaruhi penambahan jumlah data atau informasi. Saat ini, total telah teridentifikasi jumlah informan yakni 43 orang. Selain itu, penelitian ini juga dilengkapi dengan pengumpulan dokumentasi dari berbagai sumber foto, video, dan rekaman transkrip wawancara untuk menunjang kelengkapan data.

II.3 Metode Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif

Penulis menggunakan indeks komersialisasi rumah tangga untuk menghitung komersialisasi pertanian perkotaan di rumah tangga petani kota komersial. Indeks komersialisasi rumah tangga adalah formula untuk menghitung tingkat komersialisasi [27], [28].

Perhitungan indeks komersialisasi rumah tangga menggunakan rumus berikut: nilai kotor penjualan tanaman pada tahun J dibagi dengan nilai kotor total produksi tanaman pada tahun J dan selanjutnya dikalikan dengan 100. Hasil perhitungan dinyatakan dalam persentase (%). Nilai komersialisasi berkisar antara 0 sampai 100. Nilai 0 menunjukkan bahwa produksi hanya untuk kebutuhan sendiri (total subsisten), sedangkan nilai 100 berarti produksi untuk tujuan komersial (tingkat komersial tinggi).

Selain itu, peneliti juga coba mengukur perubahan unit input yang dibeli. Hal ini mengacu pada von Braun & Kennedy [29] bahwa komersialisasi perlu dilihat dari dua sisi yakni sisi input dan output produksi. Oleh karena itu dalam pengukuran unit input, penulis mengumpulkan data terkait penggunaan input (benih, pupuk, dan pestisida organik maupun organik) serta input inovasi dan peralatan pasca panen pada tahun 2021 dan tahun 2022. Proses input data juga menggunakan *microsoft excel* dimana penulis telah lebih dulu membuat tabel perbandingan pada tahun 2021 dan tahun 2022 terkait unit input organik maupun anorganik (benih, pupuk dan pestisida) serta ditambah dengan tabel inovasi dan peralatan pasca panen.

Kemudian, proses analisis data menggunakan uji beda rata-rata berdasarkan sampel dependen untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan penggunaan input. Untuk masing-masing satuan yang digunakan dalam pengukuran penggunaan benih organik dan anorganik menggunakan satuan kilogram, penggunaan pupuk organik dan anorganik menggunakan satuan kilogram artinya hanya pupuk padat yang dihitung, penggunaan pestisida organik maupun anorganik dihitung berdasarkan satuan liter sementara inovasi dan peralatan pasca panen dihitung berdasarkan satuan buah. Selanjutnya, penulis menggunakan analisis statistik deskriptif untuk menganalisis data yang akan dikumpulkan. Sementara output data dalam penelitian ini adalah informasi dalam bentuk naratif, serta penggunaan tabel, perhitungan persentase dan juga diagram.

Proses analisis data kualitatif dalam penelitian ini memiliki beberapa tahapan yaitu pengumpulan data, pemampatan data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Langkah pertama, kami mengumpulkan seluruh data dari transkrip wawancara, catatan lapangan, dan hasil dokumentasi. Kemudian, kami mempelajari semua data dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan. Tahap selanjutnya, penulis memulai dengan melakukan reduksi data, dalam proses ini memuat tahapan kondensasi untuk mengklasifikasikan informasi, mengabstraksi, menyederhanakan dan juga mentransformasikan data. Penulis melakukan komparasi dari jawaban informan yang sudah tersaji dalam tabel-tabel yang diklasifikasikan berdasarkan dimensi yang telah disusun. Penulis melakukan penyajian data secara naratif untuk memaparkan pembahasan agar lebih lengkap dan terorganisir. Setelah itu, penulis melakukan penarikan kesimpulan. Proses penarikan kesimpulan secara general ini dilakukan dengan mengidentifikasi keseluruhan jawaban penelitian yang sudah ada sehingga jika teridentifikasi bukti-bukti yang mendukung secara konsisten maka dilakukan penarikan kesimpulan. Namun jika tidak ditemukan bukti yang mendukung sedangkan bukti yang ada tidak menggambarkan jawaban sementara maka kesimpulan menjadi berubah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

III.1 Fenomena Komersialisasi Pertanian Kota di Bandung Raya Berdasarkan Perspektif Ekologi Politik

Komersialisasi pertanian kota di Indonesia tidak lepas dari pengaruh kebijakan yang disepakati secara kolektif oleh persekutuan atau asosiasi dari berbagai negara di dunia. Manifestasi yang mencerminkan upaya untuk mengkomersialisasikan pertanian secara makro adalah adanya dorongan ekspor komoditas pangan. Stimulus ekspor yang diterima suatu negara turut dipengaruhi

oleh struktur ekonomi politik global. Dengan kata lain, terdapat intervensi dari aktor dan struktur kebijakan yang ditetapkan secara kolektif oleh persekutuan antar negara.

Dalam konteks Indonesia, kebijakan ekspor memiliki ketersinggungan dengan riwayat kerjasama regional yang diikuti oleh pemerintah. Salah satunya adalah pembentukan ASEAN (*the Association of Southeast Asian Nations*) yang beranggotakan negara-negara di zona Asia Tenggara pada tahun 1967. Di tahun berikutnya yakni 1968, negara-negara anggota ASEAN mulai menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu bidang kerjasama demi mendongkrak produksi dan suplai pangan di kawasan tersebut [30].

Para petinggi ASEAN mulai memiliki ambisi ekonomi yang menurut mereka sangat penting untuk mendongkrak kesejahteraan ekonomi masyarakat di seluruh negara anggota. Salah satunya melalui agenda liberalisasi ekonomi dengan menginisiasi kawasan ekonomi tunggal bertajuk Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada tahun 2015 [31]. Hal ini bertujuan untuk menjadikan kawasan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi, kawasan ekonomi berdaya saing tinggi, berkeadilan dan terintegrasi menyeluruh dengan ekonomi global [30].

Guna memuluskan MEA, beberapa perjanjian telah lebih dulu disepakati sebagai instrumen pendukung agenda liberalisasi ekonomi regional ini. Salah satunya pada tahun 2009, negara-negara anggota ASEAN menandatangani kesepakatan dagang barang di intra asean (ATIGA) yang merupakan cikal bakal pembentukan kawasan perdagangan bebas untuk perdagangan barang antara negara anggota ASEAN [32]. ATIGA membawa serangkaian kemudahan untuk kegiatan ekspor impor di intra kawasan ASEAN. Dari kesepakatan ATIGA tersebut, dibentuk skema FTA (*Free Trade Agreement*) yang secara khusus lebih memudahkan eksportir untuk mendapatkan pengurangan tarif bea masuk di negara ASEAN. Apabila barang atau komoditas yang dikirim berupa tanaman dan produk tanaman seperti sayuran dan buah-buahan maka dikategorikan sebagai *Wholly Obtained* sehingga mendapat manfaat penurunan tarif.

Selanjutnya, pemangku kebijakan di Indonesia menginternalisasikan dorongan komersialisasi hingga ekspor ke aktor pelaku produksi sehingga mereka terus berupaya meningkatkan daya saing. Hingga saat ini, ekspor masih dianggap menjadi jalan terbukanya akses ekonomi bagi masyarakat serta menjadi sumber devisa negara. Oleh sebab itu, pemerintah pusat menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan ekspor komoditas unggulan di masing-masing daerah. Instruksi dari aktor pemerintah dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan dalam memproduksi struktur yang diwujudkan melalui penerbitan regulasi.

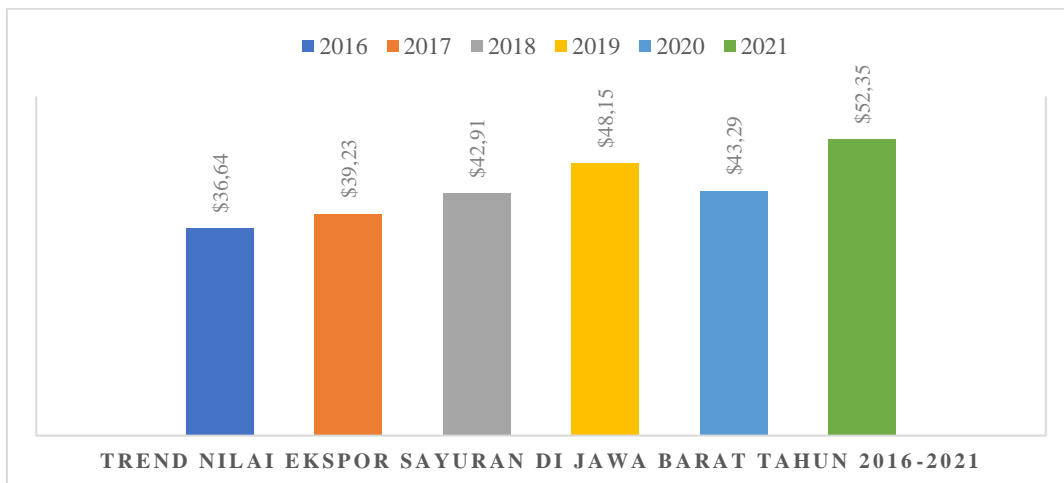
Pemerintah Indonesia melakukan penerbitan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 pasal 87 yang salah satunya adalah mengatur ekspor produk hortikultura. Peraturan tersebut berkaitan dengan pemenuhan persyaratan dan standar mutu dan/atau keamanan pangan yang diatur dengan Peraturan Menteri. Dalam peraturan tersebut juga menegaskan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi ekspor produk hortikultura.

Adapun dorongan ekspor yang dilakukan oleh pemerintah saat ini telah membuahkan hasil. Peredaran produk petani di peri-urban Bandung Raya telah memasuki sirkulasi pasar internasional. Fenomena ini juga dapat dibuktikan dari hasil wawancara dengan informan manajer pengemasan dari unit perusahaan sayur yang sudah menjalankan pemasaran produk buncis milik mitra tani mereka. Perusahaan tersebut menjadi supplier dari unit eksportir yang rutin mengirimkan sayuran jenis buncis kenya ke Negara Singapura, Hongkong dan Brunei, berikut kutipan wawancaranya:

Ekspor ke Singapura, Brunei, dan Hongkong tergantung dari bagaimana kita menjalankan kerjasama dengan petani karena sesungguhnya produk yang diminta ini lebih ke buncis super kenya yang kita sayang kalau tanam di greenhouse. Mau tidak mau karena ini ada sesuatu hal yang menarik tetapi kami belum mampu menjalankan terkait produksinya, kami kerjasamakan dengan petani. Ya ini jauh lebih dominan yang kita ekspor produknya petani. Jadi bukan 100% yang kita kelola sendiri, yang kita produksi.

Dengan demikian, maka salah satu jenis produk sayur dari petani kota telah mampu menembus pasar internasional meskipun masih terbatas di lingkup komoditas buncis super kenya saja. Bukti konkrit lainnya dapat diidentifikasi dari data nilai ekspor sayuran di Provinsi Jawa Barat. Upaya berbagai *stakeholders* untuk mendorong ekspor komoditas pertanian di Jawa Barat telah berdampak terhadap nilai ekspor sayuran yang menunjukkan tren peningkatan selama kurun waktu 2016-2021. Hal ini dapat terlihat pada Tabel 2 yang memuat diagram batang trend nilai ekspor sayuran di Jawa Barat pada tahun 2016-2021.

Tabel 2. Diagram Batang Trend Nilai Ekspor Sayuran di Jawa Barat Tahun 2016-2021



Catatan: Dalam Satuan Juta Dollar

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat [33]

Mengacu pada Tabel 2 tersebut, nilai ekspor produk sayuran di Jawa Barat mengalami peningkatan rata-rata sekitar 7,9% atau 3 juta dollar dari tahun ke tahun. Dengan demikian, selama kurun tahun 2016-2021 menunjukkan tren positif kecuali di tahun 2020 yang merupakan awal pandemi Covid-19 di Indonesia. Berdasarkan data yang berhasil dihimpun Badan Pusat Statistik di Tahun 2021, negara tujuan ekspor utama dari lima jenis komoditas hortikultur yang tercantum di atas didominasi oleh negara di Kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Thailand, dan Malaysia. Artinya, permintaan ekspor produk hortikultur dari Indonesia banyak datang dari negara di Kawasan ASEAN. Hal ini dikarenakan keistimewaan hasil kerjasama perdagangan lintas regional Indonesia dengan negara-negara ASEAN yang membuahkan dampak signifikan terhadap ramainya arus lalu lintas perdagangan ekspor, khususnya produk hortikultur yang dikirim oleh Indonesia. Sebab, sayuran dan buah termasuk dalam produk *Wholly Obtained* yang dikenakan diskon pengurangan hingga bebas tariff.

Merujuk pada perspektif ekologi politik maka peran pemangku kebijakan transnasional dalam mendorong skenario ekspor komoditas pertanian merupakan wujud pencerahan struktur signifikansi. Struktur signifikansi adalah struktur yang menghasilkan makna melalui skema interpretatif dan praktik diskursif [34]. Terdapat proses dimana aktor pemangku kebijakan dalam level global bertindak untuk menafsirkan dan menghasilkan makna baru dalam pelaksanaan pertanian kota. Salah satu yang teridentifikasi adalah penafsiran tujuan pertanian kota untuk kepentingan optimalisasi keuntungan ekonomi [3]. Komersialisasi diproyeksikan mampu membawa kemakmuran dan kesejahteraan bagi petani sebagai produsen pangan. Rasionalitas yang dibangun adalah dengan mengarahkan produksi untuk dijual di pasar sembari meningkatkan keterampilan kewirausahaan dari aktor petani kota [35], [36], [37].

Namun demikian, komersialisasi pertanian kota dapat memproduksi kembali praktik pertanian agro-industri. Model pertanian industri kerap menimbulkan dampak sosial dan lingkungan [12], [13]. Dampak lingkungan memang tidak sepenuhnya buruk. Hal ini dikarenakan fenomena ini

dapat melahirkan konsolidasi dari aktor global untuk membentuk peraturan teknis, standar kualitas pangan dan sertifikasi lingkungan guna memastikan keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan dari produk pangan yang dipasarkan. Akan tetapi, terdapat pandangan pesimis dari para ahli ekologi politik terkait perkembangan kebijakan standar kualitas pangan dan sertifikasi lingkungan [38], [39]. Mekanisme tersebut dianggap mampu menjadi acuan kepatuhan produsen terkait jaminan keamanan dan produksi bersih [38], [39]. Namun disisi lain, sertifikasi dapat mengecualikan produsen yang tidak bersertifikat termasuk dalam hal ini produsen kecil [39]. Artinya, sertifikasi menjadi struktur yang memiliki kekuatan membatasi saluran pasar petani kecil yang tidak mampu membayar biaya pengurusannya tanpa bantuan eksternal.

Fenomena ini terjadi di Bandung Raya, petani tidak mampu untuk memenuhi sertifikasi lingkungan dan persyaratan *Good Agricultural Practices* yang dibebankan kepada mereka. Sehingga petani memilih untuk menginduk pada perusahaan pertanian. Terkait kasus di kawasan peri-urban Bandung Raya, praktik pertanian perkotaan yang dilakukan para petani telah diasosiasikan sebagai mitra dari perusahaan induk pertanian yang bergerak dalam beberapa fungsi rantai pasok. Perusahaan pertanian memiliki kekuatan modal dan kendali atas beberapa fungsi rantai pasok mulai dari penyediaan input, produksi, pengemasan, hingga pengiriman. Tentunya, ketergantungan pemasaran kepada pihak perusahaan pertanian membawa konsekuensi terhadap metode produksi yang harus mengikuti peraturan dari perusahaan. Akibatnya, petani semakin kehilangan otoritas dalam mengelola metode produksi dan menentukan jenis input. Bahkan, skema ini semakin membawa ketidakberdayaan petani ketika arahan tersebut tidak memberikan jaminan kompensasi bagi petani dalam peningkatan harga jual. Oleh sebab itu, tidak semua petani memperoleh keistimewaan sebagai produsen sukses yang mampu mensuplai produk untuk pasar ekspor dan ritel modern. Untuk menembus pasar yang lebih luas, setidaknya dibutuhkan modal ekonomi, sumber daya, dan jaringan sosial yang harus dimiliki oleh petani untuk memenuhi persyaratan dari perantara (perusahaan pertanian, eksportir dan pengelola *packing house*), pemerintah, serta *buyer* internasional.

III.2 Indeks Komersialisasi Rumah Tangga Petani Kota

Hasil pengukuran dari indeks komersialisasi rumah tangga petani kota menunjukkan adanya praktik pertanian kota skala intensif. Responden petani kota mendedikasikan hampir keseluruhan hasil panen untuk dijual di beragam saluran pasar dari ekspor, modern hingga pasar induk. Buktinya, indeks komersialisasi rumah tangga petani kota komersial menunjukkan nilai 94,71% mengacu pada tabel 3. Sedangkan indeks minimum komersialisasi rumah tangga mencapai lebih dari 60% (tabel 3).

Tabel 3. Indeks Komersialisasi Rumah Tangga Petani Kota di Wilayah yang Diteliti

Keterangan	Wilayah		
	Gabungan	Lembang	Cimendan
Indeks Komersialisasi Rumah Tangga	94,71	95,21	93,91
Min	62,21	62,21	75,71
Max	100,00	100,00	100,00
St. Dev	4,86	5,43	3,65

Sumber: Olah Data Primer, 2023

Catatan: Dalam satuan persen (%)

Adapun karakteristik responden pertanian kota (tabel 4), umumnya berjenis kelamin laki laki dengan persentase 91,33% sedangkan perempuan hanya 8,67%. Sementara itu, tiga besar komoditas unggulan di empat desa yang diteliti antara lain: cabe, brokoli, dan tomat. Tingkat pendidikan dari petani kota sebagian besar didominasi oleh lulusan SD. Sementara itu, data terkait rata-rata pendapatan petani kota per bulan lebih tinggi dari upah minimum Provinsi Jawa Barat.¹ Hal ini dibuktikan dengan

¹ Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023 yaitu IDR 1.986.670,-

data responden yang memiliki pendapatan per bulan \geq Rp10.000.000 sebanyak 38%. Di bawah ini adalah ringkasan data demografis responden pada empat desa yang diteliti yang disajikan melalui tabel 4.

Tabel 4. Data Demografis Responden

Detail	Jumlah	%	Detail	Jumlah	%
Total Responden	150				
Gender			Asal Penduduk		
Laki-Laki	137	91,33%	Desa Cikidang Kec. Lembang	35	23,33%
Perempuan	13	8,67%	Desa Cibodas Kec. Lembang	57	38,00%
			Desa Cikadut Kec. Cimenyan	22	14,67%
			Desa Mekarmanik Kec. Cimenyan	36	24,00%
Pendidikan			Rata-Rata Pendapatan Per Bulan		
Tidak Tamat SD	1	0,67%	IDR 0-2.500.000	32	21,33%
SD	100	66,67%	IDR 2.500.001-5.000.000	27	18,00%
SMP	21	14,00%	IDR 5.000.001-7.500.000	21	14,00%
SMA	20	13,33%	IDR 7.500.001-10.000.000	13	8,67%
D3/S1	7	4,67%	\geq IDR 10.000.001	57	38,00%
S2	1	0,67%			
3 Komoditas Unggulan					
Cabe	144	13,19%			
Brokoli	135	12,36%			
Tomat	124	11,36%			
Total Jenis Komoditas	41				

Sumber: Olah Data Primer, 2023

Data pada tabel 4 menggambarkan bahwa petani kota komersial di peri-urban Bandung Raya tidak banyak yang mengenyam pendidikan tinggi. Meskipun demikian, mereka berhasil memiliki pendapatan yang cukup besar dari pekerjaannya sebagai petani. Artinya, tingkat pendidikan tidak menentukan seberapa besar pendapatan seseorang yang berkecimpung dalam praktik komersialisasi pertanian. Sebab, kebutuhan utama yang menopang keberlanjutan praktik pertanian kota adalah aspek permodalan. Sementara kualifikasi pendidikan bahkan tidak menjadi acuan standar bagi aktor-aktor dalam unit usaha pertanian yang akan merekrut mitra petani atau pekerja. Oleh sebab itu, meskipun aktor petani tidak memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, asalkan mereka memiliki kompetensi keahlian di bidang budidaya pertanian dan manajemen usaha yang baik maka secara otomatis mereka lebih mudah mempertahankan praktik komersialisasi pertanian kota. Sehingga dalam kasus petani kota komersial dalam penelitian ini memiliki lingkup usaha pertanian yang besar dengan rata-rata omzet penjualan sepanjang tahun 2022 mencapai Rp. 315.295.595,-.

Akan tetapi realita di lapangan, pendapatan tinggi bukan menjadi acuan utama yang membuktikan bahwa petani dalam kondisi sejahtera dan tidak merasa kesulitan secara ekonomi. Menurut informan petani, pendapatan mereka menjadi salah satu sumber dana yang akan diputar kembali sebagai modal. Dari awal pengembangan pertanian kota, mereka bersedia menggelontorkan modal besar dari beberapa sumber termasuk pinjaman ke lembaga pengelola keuangan dengan proyeksi mampu menghasilkan *cash return* yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan salah satu wawancara dengan informan produsen petani berikut ini:

Saya pinjam ke Bank nih dapatlah KUR, sekarang kalau dibilang sukses juga tergantung sudut pandang kan kalau dari sudut pandang mereka, berkembang mobilnya dan berkembang lahan pertaniannya itu berhasil tapi membuka lahan itu juga untuk membayar hutang. Jadi saat ini beban saya tinggi ke Bank iya, ke investor iya makanya saya harus terjun lapangan langsung.

Alasannya dapat dijelaskan melalui perspektif ekologi politik. Pertanian yang terkomersialisasi membutuhkan modal skala besar untuk mendongkrak produksi komoditas berkualitas secara masif [13]. Permodalan tentunya ditunjang salah satunya dari aspek pendapatan. Dengan demikian, tidak heran apabila aktor produsen petani dalam penelitian ini merupakan produsen-produsen yang dapat dikategorisasikan sebagai produsen besar karena bergerak dalam perputaran modal ekonomi yang tinggi. Pilihan rasional petani untuk melakukan spekulasi pinjaman ini merupakan buah dari proses modernisasi pertanian yang menjadi agenda kebijakan revolusi hijau di negara berkembang [40]. Proses modernisasi pertanian di Indonesia menggunakan skema *down to earth*. Skema ini diformulasikan secara terpusat oleh pemerintah yang dimanifestasikan melalui serangkaian regulasi pendukung seperti halnya reforma agraria dan intensifikasi revolusi hijau [41]. Dalam kebijakan intensifikasi revolusi hijau memberikan promosi yang besar terhadap mekanisasi dan penggunaan input tinggi. Tidak dipungkiri jika pola produksi yang mengandalkan mekanisasi dan penggunaan input tinggi menggiring produsen petani terjebak dalam logika kapitalisasi pertanian yang mengedepankan modal [42]. Berjalannya kapitalisasi pertanian sebagai dampak revolusi hijau secara sistematis berpotensi menyingkirkan petani dengan kepemilikan modal kecil dan menciptakan ketimpangan penguasaan sumber daya antar petani [43].

III.3 Perubahan unit input produksi

Tingginya indeks komersialisasi rumah tangga petani kota ternyata tidak membuahkan perubahan terhadap peningkatan unit input produksi. Perubahan unit input produksi merupakan salah satu parameter dalam pengukuran indeks komersialisasi [29]. Oleh sebab itu, penelitian ini mengkaji perubahan yang terjadi dalam penggunaan input selama tahun 2021 hingga tahun 2022 menggunakan alat analisis statistik. Mengacu pada Tabel 4 uji-t beda unit input produksi antara penggunaan tahun 2021 hingga tahun 2022 tidak menghasilkan perbedaan yang signifikan karena nilai $p \geq 0,05$. Artinya penggunaan benih, pupuk dan pestisida, baik yang organik maupun anorganik pada tahun 2021 dan 2022 memiliki kesamaan besaran dan dosis yang diberikan oleh petani kota. Hal serupa juga terjadi pada uji beda inovasi teknologi sarana dan prasarana pertanian yang digunakan oleh petani kota yang mana nilai $p \geq 0,05$. Data ini merujuk pada tidak adanya perubahan terkait penambahan atau pengurangan instalasi hidroponik, aquaponik, vertikultur, aeroponik, vertaminaphonik, greenhouse dan sarana prasarana lainnya yang digunakan oleh petani kota antara tahun 2021 dan 2022. Selain itu, peralatan pasca panen yang digunakan petani kota antara rentang waktu 2021-2022 juga tidak menunjukkan adanya perubahan ($p \geq 0,05$). Tidak adanya perbedaan ini merefleksikan bahwa sebagian besar pendapatan yang petani kota dapatkan tidak dialokasikan untuk meningkatkan kapasitas produksi melalui penambahan input, bahan, inovasi serta sarana prasarana pertanian yang digunakan. Hal ini dikarenakan antara tahun 2021 dan 2022 banyak usaha pertanian yang dilakukan oleh petani kota terdampak gelombang pandemi Covid-19. Salah satu keluhan tersebut diungkapkan oleh informan dari entitas petani berikut ini:

Nah pandemi, pihak hotel pun jadi gak bisa bayar ke kitanya, ditahan disana sampai 800 juta diem di hotel gitu. Udah tiap bulan ada barang yang masuk gitu kan. Kita pikir covid enggak lama tapi ya itu ya, sambil nungguin. Tapi kan cicilan mobil jalan terus, sewa lahan itu kita jalan, sambil cari anggaran khusus budidaya gitu kan, kan harus pisah gitu anggarannya budidaya dan distribusi. Terus, bukalah lahan yang di Ciater sana, nah buka tapi banyak kendala, banyak kendala ujung-ujungnya rugi karena covidnya kan masih berjalan karena kita waktu itu harapannya masih optimis. Tibatiba ya masih lama sampai dua tahun. Seringnya gitu, kita udah buka lahan 3 hektar terus gak kembali modal, terus yang investor juga nagih. Kalau misalkan diberhentiin malah jadi nambah hutang kan.

Dari pernyataan tersebut terungkap bahwa pandemi Covid-19 menyebabkan petani mengalami kerugian ekonomi akibat berbagai penyesuaian kebijakan. Contohnya, kebijakan pembatasan sosial berskala besar yang berpengaruh terhadap sepiunya berbagai saluran pasar termasuk

hotel dan restoran sebagai salah satu sumber datangnya permintaan pasokan produk hortikultura. Pada akhirnya di sepanjang tahun 2021 hingga 2022, petani hanya fokus untuk mempertahankan usaha pertanian mereka agar tetap berjalan ditengah situasi pasar yang sedang lesu dan terhimpit cicilan pinjaman. Oleh karena itu, rata-rata petani memilih tidak melakukan ekspansi agar aktivitas produksi dapat berkelanjutan. Berikut adalah hasil uji beda penggunaan input, inovasi prasarana, dan peralatan pasca panen yang disajikan dalam bentuk tabel 5 di bawah ini:

Tabel 5 Uji-(t) Beda Penggunaan Input, Inovasi Prasarana, dan Peralatan Pasca Panen

	<i>Benih Organik 2021</i>	<i>Benih Organik 2022</i>		<i>Benih Anorganik 2021</i>	<i>Benih Anorganik 2022</i>
Mean	0,01	0,01	Mean	4,84	4,86
Variance	0,00	0,00	Variance	16,68	16,64
Observations	150,00	150,00	Observations	150,00	150,00
t Stat	0,00		t Stat	-0,04	
P(T<=t) one-tail	0,50		P(T<=t) one-tail	0,49	
t Critical one-tail	1,65		t Critical one-tail	1,65	
P(T<=t) two-tail	1,00		P(T<=t) two-tail	0,97	
t Critical two-tail	1,97		t Critical two-tail	1,97	
	<i>Pupuk Organik 2021</i>	<i>Pupuk Organik 2022</i>		<i>Pupuk Anorganik 2021</i>	<i>Pupuk Anorganik 2022</i>
Mean	78,51	80,64	Mean	6,58	6,55
Variance	7113,98	8197,02	Variance	31,02	30,78
Observations	150,00	150,00	Observations	150,00	150,00
t Stat	-0,21		t Stat	0,04	
P(T<=t) one-tail	0,42		P(T<=t) one-tail	0,48	
t Critical one-tail	1,65		t Critical one-tail	1,65	
P(T<=t) two-tail	0,83		P(T<=t) two-tail	0,97	
t Critical two-tail	1,97		t Critical two-tail	1,97	
	<i>Pestisida Organik 2021</i>	<i>Pestisida Organik 2022</i>		<i>Pestisida Anorganik 2021</i>	<i>Pestisida Anorganik 2022</i>
Mean	0,04	0,04	Mean	1,98	2,02
Variance	0,11	0,11	Variance	3,10	3,70
Observations	150,00	150,00	Observations	150,00	150,00
t Stat	0,00		t Stat	-0,22	
P(T<=t) one-tail	0,50		P(T<=t) one-tail	0,41	
t Critical one-tail	1,65		t Critical one-tail	1,65	
P(T<=t) two-tail	1,00		P(T<=t) two-tail	0,83	
t Critical two-tail	1,97		t Critical two-tail	1,97	

	<i>Inovasi 2021</i>	<i>Inovasi 2022</i>		<i>Peralatan Pasca Panen 2021</i>	<i>Peralatan Pasca Panen 2022</i>
Mean	0,27	0,30	Mean	2,63	2,63
Variance	0,24	0,25	Variance	0,48	0,48
Observations	150,00	150,00	Observations	150,00	150,00
t Stat	-0,58		t Stat	0,00	
P(T<=t) one-tail	0,28		P(T<=t) one-tail	0,50	
t Critical one-tail	1,65		t Critical one-tail	1,65	
P(T<=t) two-tail	0,56		P(T<=t) two-tail	1,00	
t Critical two-tail	1,97		t Critical two-tail	1,97	

Sumber: Olah Data Primer (2023)

Berbagai macam jenis input yang teridentifikasi pada tabel 5. berasal dari pembelian sebab peraturan teknis produksi yang diinstruksikan oleh perantara pasar sering kali menuntut pengadaan input harus menggunakan merk tertentu. Hal ini mempersempit kemungkinan petani untuk mengeksplorasi pengetahuan dan bereksperimen dalam rangka memproduksi input mandiri. Selain terhalang dari aspek tuntutan standar pasar, petani juga harus berhadapan dengan regulasi terkait produksi input yang memerlukan adanya sertifikasi kompetensi dengan prosedur pengajuan terlebih dahulu kepada pemerintah daerah. Adapun pemenuhan sertifikasi kompetensi tersebut harus melewati serangkaian persyaratan teknis dan administrasi serta validasi lapangan. Menurut informan petani, prosedur administrasi yang harus dipenuhi cukup rumit sementara mereka juga harus fokus untuk menciptakan produk sesuai standar pasar.

Bagi petani, mereka lebih baik melakukan pembelian input yang sudah jelas kualitasnya daripada melakukan pengembangan input benih, pestisida atau pupuk yang tentu saja membutuhkan modal dan kapasitas yang besar. Contohnya dalam pengembangan input benih, tanpa kapasitas yang mumpuni serta ketersediaan modal maka proses ini akan mustahil untuk dilakukan. Para petani harus siap *trial and error* selama proses mengembangkan benih unggul dan hal tersebut membutuhkan kesiapan waktu, tenaga, dan finansial yang besar. Oleh karena itu, mereka menjadi kurang tertarik dan tidak memiliki dorongan untuk menekuni pengembangan benih yang sebetulnya Indonesia memiliki keragaman jenis benih lokal yang patut dilestarikan.

Oleh karena itu, keputusan pembelian input adalah pilihan rasional terbaik menurut informan petani kota. Berdasarkan lensa ekologi politik, fenomena ini merujuk pada kondisi dimana petani berpotensi kehilangan pengetahuan lingkungan dan kearifan lokal dalam memproduksi input [12]. Hilangnya jejak pengetahuan dalam produksi input akan mengurangi penguasaan petani dalam pengelolaan sumber daya pertanian dan semakin mereproduksi ketergantungan dalam penyediaan input. Dengan demikian, sektor pengadaan input hortikultura di Indonesia lebih banyak dikuasai oleh aktor perusahaan multinasional serta aktor badan usaha daerah yang telah memiliki izin dan telah mengurus sertifikasi kompetensi [44].

IV. KESIMPULAN

Pertanian kota telah menjadi aktivitas budidaya yang terkomersialisasi dimana aktor pertanian kota berorientasi pada upaya meningkatkan nilai tambah. Hal ini dapat ditunjukkan dari tingginya indeks komersialisasi rumah tangga petani kota yang mencapai 94,71%. Dari data tersebut terbukti bahwa pengalokasian hasil panen untuk penjualan lebih besar daripada untuk kebutuhan lainnya seperti halnya kebutuhan pangan untuk rumah tangga. Fenomena ini tentunya kontradiktif terhadap landasan utama pertanian kota di awal perkembangannya yang disuarakan oleh entitas negara dan asosiasi global sebagai mekanisme dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam ruang lingkup pembangunan berkelanjutan, pertanian kota menjadi alternatif solusi khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan dan pemenuhan nutrisi keluarga. Namun dengan adanya fenomena komersialisasi ini merefleksikan temuan baru bahwa sumber daya pangan adalah komoditas perdagangan yang strategis dan dibutuhkan oleh seluruh entitas masyarakat global.

Dibalik komodifikasi pangan, terdapat realita praktik komersialisasi yang mencerminkan adanya tekanan pasar terhadap peraturan teknis produksi dan pemenuhan standar kualitas pangan yang harus ditaati oleh produsen. Untuk masuk dalam perdagangan komoditas pertanian skala ritel hingga ekspor, aktor petani kota yang kekurangan modal harus menjalin kemitraan dengan perusahaan pertanian yang sering kali menciptakan hubungan asimetris. Hal ini dikarenakan petani kota harus melakukan penyesuaian terhadap berbagai peraturan teknis dan standar kualitas pangan. Mekanisme ini memiliki manfaat positif terhadap interaksi aktor produsen dengan lingkungan, khususnya terkait dengan adanya kepastian terhadap jaminan keamanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Disisi lain, keterikatan petani terhadap penyesuaian standar yang dibuat oleh aktor pasar turut memproduksi pelemahan terhadap kedaulatan petani dalam menentukan input, metode budidaya hingga tidak memiliki kuasa dalam menentukan harga jual.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia atas kesempatan dan bantuan finansial yang diberikan dalam bentuk beasiswa “Program Magister Menuju Doktor Sarjana Unggulan (PMDSU)”.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Van Veenhuizen and G. Danso, *Profitability and sustainability of urban and periurban agriculture*, vol. 19. Food & Agriculture Org., 2007.
- [2] S. Pauleit, D. O. Pribadi, and H. Abo El Wafa, “Peri-urban agriculture: lessons learnt from Jakarta and Addis Ababa,” *Field Actions Science Reports. The journal of field actions*, no. Special Issue 20, pp. 18–25, 2019.
- [3] L. J. A. Mougeot, “Urban agriculture: Definition, presence, potentials and risks, and policy challenges,” *Cities feeding people series; rept. 31*, 2000.
- [4] R. van Veenhuizen, *Cities Farming for the Future - Urban Agriculture for Green and Productive Cities (2006)*. 2006.
- [5] W. Vos, “Urban Agriculture in the Netherlands,” *Urban Agriculture Magazine*, vol. 24, no. 24, pp. 530–540, 2010.
- [6] L. J. A. Mougeot, *Agropolis: The social, political, and environmental dimensions of urban agriculture*. 2005. doi: 10.4324/9781849775892.
- [7] H. Nyantakyi-Frimpong, G. Arku, and D. K. B. Inkoom, “Urban agriculture and political ecology of health in municipal Ashaiman, Ghana,” *Geoforum*, vol. 72, pp. 38–48, Jun. 2016, doi: 10.1016/j.geoforum.2016.04.001.
- [8] P. L. Pingali, “Environmental consequences of agricultural commercialization in Asia,” *Environ Dev Econ*, pp. 483–502, 2001.
- [9] S. Kem, “Commercialisation of Smallholder Agriculture in Cambodia: Impact of the Cassava Boom on Rural Livelihoods and Agrarian Change Sothorn Kem BSc (Agronomy) MSc (Agriculture Systems),” 2017.
- [10] T. Otto, J., & Mutersbaugh, “Certified Political Ecology,” in *The Routledge Handbook of Political Ecology*, J. Perreault, T., Bridge, G., and McCarthy, Ed., London and New York.: Routledge Taylor and Francis Group, 2015.
- [11] B. Winders, A. Heslin, G. Ross, H. Weksler, and S. Berry, “Life after the regime: market instability with the fall of the US food regime,” *Agric Human Values*, vol. 33, no. 1, pp. 73–88, 2016.
- [12] L. S. Grossman, *The political ecology of bananas: contract farming, peasants, and agrarian change in the Eastern Caribbean*. Univ of North Carolina Press, 1998.
- [13] O. F. Giraldo, *Political Ecology of Agriculture*. Springer, 2019.
- [14] K. I. Safitri, O. S. Abdoellah, B. Gunawan, and Y. Suparman, “Market Pressure Based on International Food Standards in Export-Scale Urban Farming: Political Ecology Perspective,” *Qual. Rep*, pp. 1311–1333, 2022.
- [15] O. S. Abdoellah *et al.*, “Between food fulfillment and income: Can urban agriculture contribute to both?,” *Geography and Sustainability*, vol. 4, no. 2, pp. 127–137, 2023, doi: <https://doi.org/10.1016/j.geosus.2023.03.001>.
- [16] P. Blaikie and H. Brookfield, *Land degradation and society*. Routledge, 2015.
- [17] O. S. Abdoellah *et al.*, “Homegarden commercialization: extent, household characteristics, and effect on food security and food sovereignty in Rural Indonesia,” *Sustain Sci*, vol. 15, no. 3, pp. 797–815, 2020, doi: 10.1007/s11625-020-00788-9.
- [18] G. Hagos Belay, A. Gebreslassie, A. Teklay, and M. Tesfay, “Urban Agriculture Commercialization: an Alternative to Food Security (Case of Mekelle city),” *Agricultural Social Economic Journal*, vol. 20, no. 3, pp. 213–224, 2020, doi: 10.21776/ub.agrise.2020.020.3.5.

- [19] O. Justus, B. Knerr, G. Owuor, and E. Ouma, "Agricultural Commercialization and Household Food Security: The case of Smallholders in Great Lakes Region of Central Africa; Agriculture in the interconnected world," in *Proceedings of the 29th International Conference of Agricultural Economists (ICAE)*, 2015, pp. 8–14.
- [20] V. Linderhof, V. Janssen, and T. Achterbosch, "Does agricultural commercialization affect food security: The case of crop-producing households in the regions of post-reform Vietnam?," *Towards Sustainable Global Food Systems*, p. 15, 2019.
- [21] R. Nuraeni, S. R. P. Sitorus, and D. R. Panuju, "Analisis perubahan penggunaan lahan dan arahan penggunaan lahan wilayah di Kabupaten Bandung," *Buletin Tanah dan Lahan*, vol. 1, no. 1, pp. 79–85, 2017.
- [22] W. Kastolani, "Pengembangan Wisata Terpadu Berdasarkan Daya Tarik Kawasan Konservasi di Kecamatan Cimenyan," 2008.
- [23] R. Septian and T. Judiantono, "Identifikasi Karakteristik Perangkutan Pasca Produksi Pertanian di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat," *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, vol. 16, no. 1, p. 8, 2019.
- [24] F. Akhmad, S. Widjaya, and A. Nugraha, "Pengukuran Kinerja Perusahaan Pertanian Di Lembang, Jawa Barat Dengan Pendekatan Balanced Score Card," *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, vol. 4, no. 2, 2016.
- [25] P. Sedgwick, "Cluster sampling," *Bmj*, vol. 348, 2014.
- [26] M. H. Mian, "Multistage cluster sampling," Doctoral Dissertation, UNSW Sidney, 1969. doi: 10.26190/unsworks/9195.
- [27] J. Govereh and T. S. Jayne, "Effects of cash crop production on Food crop productivity in Zimbabwe: Synergies or trade-offs?," 1999.
- [28] P. J. Strasberg, T. S. Jayne, T. Yamano, J. K. Nyoro, D. D. Karanja, and J. Strauss, "Effects of agricultural commercialization on food crop input use and productivity in Kenya," 1999.
- [29] J. von Braun and E. Kennedy, *Agricultural Commercialization, Economic Development, and Nutrition (International Food Policy Research Institute)*. 1994.
- [30] The Habibie Center, "Agriculture in ASEAN: Trade and Investment Guidebook," 2017.
- [31] M. T. Malau, "Aspek hukum peraturan dan kebijakan pemerintah Indonesia menghadapi liberalisasi ekonomi regional: Masyarakat ekonomi ASEAN 2015," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 3, no. 2, pp. 163–182, 2014.
- [32] Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Free Trade Agreements." Accessed: Jul. 10, 2023. [Online]. Available: <https://ftacenter.kemendag.go.id/atiga>
- [33] A. S. Prabowo and A. T. Prasetya, "Menilik Ekspor Sayuran di Jawa Barat." Accessed: Jul. 13, 2023. [Online]. Available: opendata.jabarprov.go.id/id/visualisasi/menilik-ekspor-sayuran-di-jawa-barat---jdvf-competition-2022-2
- [34] M. Lamsal, "The structuration approach of Anthony Giddens," *Himalayan Journal of Sociology and Anthropology*, vol. 5, pp. 111–122, 2012.
- [35] E. Holt-Giménez, Y. Wang, and A. Shattuck, "The urban and northern face of global land grabs," in *International Conference on Global Land Grabbing*, 2011, pp. 6–8.
- [36] A. H. Alkon and T. M. Mares, "Food sovereignty in US food movements: Radical visions and neoliberal constraints," *Agric Human Values*, vol. 29, no. 3, pp. 347–359, 2012.
- [37] N. McClintock, "Radical, reformist, and garden-variety neoliberal: coming to terms with urban agriculture's contradictions," *Local Environ*, vol. 19, no. 2, pp. 147–171, 2014, doi: 10.1080/13549839.2012.752797.
- [38] S. R. Bush *et al.*, "Certify sustainable aquaculture?," *Science (1979)*, vol. 341, no. 6150, pp. 1067–1068, 2013.
- [39] D. Hall, "The Political Ecology of International Agri-Food Systems.," in *The Routledge Handbook of Political Ecology*. Routledge Taylor and Francis Group., J. (eds) Perreault, T., Bridge, G., and McCarthy, Ed., London and New York: Routledge Taylor and Francis Group., 2015.

- [40] R. L. Bryant and S. Bailey, *Third world political ecology*. Psychology Press, 1997.
- [41] A. Izudin, “Menyuarakan Hak tanpa Sekat: Sebuah Ekspresi Gerakan Sosial Petani,” *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, vol. 3, no. 2, pp. 211–224, 2019.
- [42] N. F. Gultom, D. Meidalima, and C. Chuzaimah, “The Impact of Agricultural Mechanization on the Income of Female Farm Labourers in Sungai Dua Village, Rambutan District Banyuasin Regency”, *Journal of Integrated Agribusiness*, vol. 4, no. 2, pp. 67–78, 2022.
- [43] D. Suseno and H. Suyatna, “Mewujudkan kebijakan pertanian yang pro-petani,” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 10, no. 3, pp. 267–294, 2007.
- [44] S. T. Rahmani and R. Yanuar, “Strategi Pengembangan Usaha Benih Hortikultura di Perusahaan Lokal (Studi Kasus di CV Nusa Heulang, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat),” *Jurnal Pertanian Agros*, vol. 25, no. 3, 2023.